

ABSTRAK

Sanksi pekerjaan sosial adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat yang melanggar aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Salah satu daerah yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatasi situasi yang dikategorikan darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyeimbangkan kedudukan sanksi pekerjaan sosial dalam Peraturan Kepala Daerah (Gubernur) dengan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengikuti Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pekerjaan sosial yang termasuk dalam sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat dilaksanakan dalam Peraturan Gubernur. Sanksi pekerjaan sosial ini harus diatur dalam Peraturan Daerah. Karena kedudukan Perda lebih tinggi dari Pergub. Karena masalah ini, menimbulkan konflik peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti Hirarki Hukum. Bahkan dalam keadaan darurat, Gubernur hanya dapat mengajukan rancangan peraturan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi hanya DPRD yang dapat mengesahkannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan masukan kepada instansi pemerintah khususnya Gubernur untuk memperhatikan konteks dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Hirarki Peraturan Perundang-undangan. Jadi tidak ada konflik antara hukum dan peraturan.

Kata Kunci :Sanksi Kerja Sosial, Keadaan Darurat, COVID-19

ABSTRACT

Social work sanctions are sanctions given to a person or society who violates the rules regarding Large-Scale Social Restrictions (PSBB). PSBB is one of the government's policies related to handling cases of Coronavirus Disease 19 (COVID-19). One of the areas that apply PSBB is DKI Jakarta based on DKI Jakarta Governor Regulation Number 3 of 2021 to resolve situations that are categorized as emergencies. The purpose of this research is to balance the position of social work sanctions in the Regional Head Regulation (Governor) with the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government following the Hierarchy of Legislation in Indonesia. This research uses a normative research method and using a statutory approach.

The results of this research show that social work sanctions are included in criminal sanctions based on the Criminal Code (KUHP), cannot be carried out in the Governor's Regulation. This social work sanction should be regulated in a Regional Regulation. Because the position of the Regional Regulation is higher than the Governor's Regulation. Because of this problem, it creates a conflict of laws and regulations that are not following the Hierarchy of Laws. Even in an emergency, the Governor can only submit a draft in a joint regulation with the Regional House of Representatives (DPRD), but only the DPRD can ratify. This study aims to provide advice and input to government institutions, especially the Governor, to pay attention to the context in every making laws and regulations that are based on the Hierarchy of Laws. So there are no conflicts between laws and regulations.

Keywords: Social Work Sanctions, Emergencies, COVID-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PRNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT SANKSI HUKUM DAN PERATURAN GUBERNUR.....	16
2.1 Pengertian Sanksi Hukum	16
2.1.1 Sanksi Menurut Para Ahli	17
2.1.2 Jenis-jenis Sanksi	18
2.2 Pengertian Peraturan Gubernur	22
2.3 Teori Pemberian Sanksi	24

2.4	Teori Peraturan Perundang-Undangan	28
2.4.1	Teori Peraturan Perundang-Undangan Menurut Para Ahli	32
2.5	Teori Keadaan Darurat	35
BAB III SANKSI DALAM PERATURAN GUBERNUR.....		41
3.1	Subtansi Peraturan Gubernur	41
3.2	Pemuatan Sanksi Dalam Peraturan Gubernur Dalam Keadaan Darurat ...	53
BAB 1V PENUTUP.....		65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67